



**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**POITERS KETUA DPR-RI**  
**MENGENAI CATATAN REFLEKSI 2009, HARAPAN 2010**  
**DISAMPAIKAN DI PRESS ROOM DPR-RI**

Jakarta, 23 Desember 2009

**REFLEKSI 2009**

1. Tahun 2009 merupakan tahun yang menentukan dalam sejarah politik Indonesia mengingat pada tahun ini diselenggarakan pemilu, baik pemilu legislatif (memilih anggota DPR, DPD dan DPRD) maupun Pilpres. Berikut ini beberapa catatan khusus yang menyertai keberhasilan Pemilu 2009.
  - a. Patut disyukuri bahwa Pemilu-Pemilu tersebut telah berjalan dengan lancar dan demokratis, sehingga semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan AS –dari segi jumlah penduduk), dan negara demokrasi muslim terbesar di dunia.
  - b. Semakin sederhananya realitas kepartaian di tanah air sebagai konsekuensi penerapan *Parliamentary Threshold* (PT), Pemilu 2009 menghasilkan sembilan fraksi (sembilan partai politik), yakni mereka yang memperoleh kursi di DPR sesuai ketentuan PT.
  - c. Dengan tingginya partisipasi rakyat dalam pemilu (di atas 70 persen), maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik rakyat demikian tinggi pula, dan tentu saja ini berdampak pada tingginya legitimasi politik atas para wakil rakyat, maupun presiden dan wakil presiden terpilih.
2. Tahun 2009 juga merupakan tahun atau momentum awal dari periode lima tahun lembaga legislatif maupun eksekutif (2009-2014). Terdapat semangat baru dari

kedua lembaga untuk bekerja secara lebih baik. Di DPR sendiri, kami (khususnya Pimpinan DPR) bertekad untuk membawa lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, memiliki citra yang lebih baik di mata publik/rakyat, dan senantiasa aspiratif dan optimal di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

3. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif semakin harmonis (seiring dengan komposisi dan perimbangan politik baru pasca-pemilu), walaupun berjalan dengan cukup dinamis (dengan adanya pembentukan pansus hak angket Bank Century, yang pada saat ini masih melakukan tugasnya). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi "*checks and balances*" berjalan dengan baik, dimana DPR dapat bekerja secara optimal sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
4. Beberapa catatan di bidang politik lainnya adalah:
  - a. Mengemukanya kasus hukum yang melibatkan pejabat KPK (Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah), kepolisian dan kejaksaan, yang memperoleh sorotan publik secara luas. Kasus ini memunculkan suatu pro-kontra di kalangan masyarakat luas, yang menuntut Pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut secara tepat, tanpa mencederai rasa keadilan. Terhadap kasus ini, *alhamdulillah*, setelah Presiden melakukan langkah-langkah yang tepat, dengan membentuk Tim 9 yang memberikan rekomendasi penyelesaian kasus tersebut, maka perkembangannya sangat signifikan, bahwa kasus ini telah dapat diselesaikan dengan baik.
  - b. Yang masih menjadi sorotan publik secara luas pada saat ini adalah kasus Bank Century, dengan telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Pansus diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, obyektif, dan menghasilkan suatu rekomendasi yang tepat, sehingga kasus Bank Century segera dapat diselesaikan secara elegan. Dengan selesainya pengungkapan kasus Bank Century, diharapkan iklim dan suasana politik kembali kondusif, sehingga pemerintah dan lembaga-

lembaga negara lain dapat lebih berkonsentrasi di dalam mengimplementasikan agenda-agenda pembangunan nasional di segala bidang.

- c. Kita juga mencatat adanya sejumlah aksi massa dalam merepons berbagai kasus yang bernuansa politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (lokal). Fenomena ini tentu saja merupakan bagian dari dinamika demokrasi, walaupun aksi-aksi massa tersebut rawan kepada perilaku anarkhi. *Alhamdulillah*, secara umum aksi 9 Desember 2009 dalam merepons isu korupsi dapat berjalan dengan baik, seiring dengan antisipasi yang dilakukan oleh Presiden (yang telah mengingatkan sejak awal agar aksi tersebut tidak menjadi anarkhi –walaupun di Makassar, aksi yang ada berubah menjadi anarkhis). Pada tahun 2009 ini juga, aksi anarkhis juga pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara, yang ditandai dengan tragedi meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Hikmah mendasar dari hal-hal tersebut adalah bahwa dalam era demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya, namun demikian hendaknya tetap dilakukan di dalam koridor demokrasi yang menolak kekerasan (anarkhisme).

5. Isu-isu lain yang menonjol pada 2009, antara lain:

- a. Terjadinya aksi terorisme dengan adanya peledakan bom di dua hotel di Jakarta, yakni Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott pada 17 Juli 2009. Aksi teror tersebut tentu saja memunculkan rasa keprihatinan mendalam, serta mengobarkan semangat untuk memerangi terorisme. *Alhamdulillah* pihak aparat kepolisian telah mampu bekerja secara cepat dan tepat, sehingga gembong-gembong teroris, termasuk yang paling dicari-cari, yakni Noordin M Top dapat dipatahkan (gembong-gembong tersebut tewas dalam penggerebekan aparat kepolisian).
- b. Kita juga dihadapkan pada berbagai kasus yang mengguncang rasa keadilan masyarakat, yang membuat masyarakat larut dalam keprihatinan, seperti kasus yang menimpa Prita Mulyasari (yang telah diadukan oleh RS Omni

Internasional Tangerang, karena mengeluhkan pelayanan RS tersebut melalui email atau surat elektronik), kasus Nenek Minah yang diadili karena dituduh mencuri tiga butir kakao, dan kasus-kasus serupa (termasuk kasus pencurian semangka di Kediri). Hal ini memunculkan suatu keprihatinan bersama, dan kita berharap agar dunia hukum kita tidak dikesankan semakin diskriminatif, tetapi semakin bijak dan adil di dalam merespons dan menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan rakyat kecil.

- c. Hal lain yang membuat kita masih larut dalam empati adalah, adanya berbagai musibah bencana alam, baik tragedi Situ Gintung di Ciputat, Tangerang; bencana gempa di beberapa tempat di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan yang lain. Kepada yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, dan kita berharap pemerintah dan semua pihak dapat memulihkan kembali kondisi kehidupan masyarakat pasca-bencana –dan mampu mengantisipasi bencana alam-bencana alam yang masih mungkin akan terjadi, mengingat Indonesia adalah merupakan negara yang rawan gempa.

## **HARAPAN 2010**

1. Berkaca dari pengalaman 2009, maka pada tahun 2010, diharapkan:
  - a. Di bidang politik, iklim dan suasananya menjadi semakin kondusif, sehingga pemerintah dan pihak-pihak lain dapat berkonsentrasi di dalam mengoptimalisasikan implementasi agenda pembangunan nasional. Hubungan antara lembaga DPR dan pemerintah, maupun antar-lembaga negara berjalan secara harmonis-konstitusional, sehingga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara baik dan konstruktif.
  - b. Di bidang politik juga, kita ingatkan agar demokrasi langsung yang dilakukan di dalam proses pilkada (di tahun 2010, akan banyak dilakukan pilkada, baik pilkada provinsi maupun kabupaten/kota), jangan sampai terjebak pada

anarkhisme. Sebaliknya prosesnya berjalan baik dan demokratis, sehingga sangat bermakna penting bagi pembangunan di daerah.

- c. Di bidang hukum, kita berharap bahwa proses penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik, tidak mencederai rasa keadilan (dalam masyarakat). Di sisi lain, salah satu program unggulan pemerintah dalam memberantas mafia hukum, merupakan program yang pantas diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Harapannya, pemberantasan mafia hukum dapat berjalan secara efektif.
- d. Di bidang ekonomi, kita berharap ada kemajuan yang signifikan, seiring dengan iklim dan suasana politik yang kondusif. Kita berharap iklim investasi pada 2010 menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga ikut terdongkrak naik, angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan menurun. Singkat kata, ekonomi 2010 diharapkan semakin membaik.
- e. Secara khusus, bagi lembaga DPR, kita bertekad agar lembaga ini semakin optimal di dalam mengimplementasikan fungsi-fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. DPR diharapkan semakin diapresiasi positif oleh masyarakat, menjadi lembaga yang berwibawa dan aspiratif –sehingga gerakan ekstra-parlementer tidak terjadi, atau walaupun terjadi hal tersebut bukan dalam arti menafikan lembaga DPR, tetapi komplementer dengan fungsi pengawasan DPR.

2. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan di masa lalu.

Jakarta, 23 Desember 2009

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**H. MARZUKI ALIE**